

BANDUNG, Prolitenews – Kepala Dinas Pendidikan Asep Gupron membenarkan saat ini pengawasan makan bergizi gratis (MBG) cukup ketat dan intens dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP).

Di kota Bandung ada 87 dan sedang berproses 3 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Nah sekarang Dinkes intens melakukan pendampingan terhadap beberapa SPPG. Kita ada 87 dan 3 berproses jadi ada 90, sebagian besar belum mendapat SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi). Makanya pak wali meminta Dinkes dan DKPP melakukan pendamping layak atau tidak SPPG tersebut,” ujar Asep di Balai Kota, Selasa (14/10/2025).

Baca Juga:Menko Zulkifli Hasan Paparkan Program MGB di Hadapan Para Siswa Menuju Indonesia Emas 2045

Kota Bandung sendiri kata Asep baru menyediakan MBG sekitar (62,58%) atau hampir 312.840 peserta didik dari jumlah peserta didik terdata di dapodik Disdik dan Kemenag sebanyak 499.862 tingkat TK, SD, MI, MTs, SMK.

“Semua dapat SMA 3 pun dapat, yang menentukan sekolah dapat enggak itu BGN bukan ranah kami. Pokoknya kami mengawas TK, SD, SMP, Madrasah Ibtidaiyah, Aliyah, Tsanawiyah. SMA sama tapi bukan dibawah kita. Semuanya ada 87 lokasi termasuk SMA per zonasi,” ujarnya.

Sekarang setiap sekolah wajib membentuk pengawas. Dimana tugasnya mengecek makanan sebelum dikasih ke peserta didik.

Baca Juga:Satgas MBG akan Dibentuk Pemkot Bandung untuk Meningkatkan Mutu

“Dilihat dulu berlendir gak, lalu dicium berbau gak. Kalau tidak layak sekolah tidak menentukan tapi koordinasi dulu dengan Dinkes dan DKPP setelah dicek kedua OPD tersebut kalau tidak layak buat berita acara,” tegasnya.



Baca Selanjutnya  
Waspada! Area Blindspot, Kunci Aman Berkendara di Jalan Raya